

PERAN HUMAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENJALANKAN PROGRAM P4GN

Novia Riska¹, Sugandi², Kadek Dristiana³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskriptifkan dan menganalisis bagaimana Peran Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menjalankan Program P4GN. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori SMCR dengan Fokus penelitian Penasehat Ahli, Fasilitator Komunikasi, Fasilitator Proses Pemecahan Masalah, dan Teknisi Komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan Peran humas sebagai penasehat ahli BNNP Kaltim dalam menjalankan program P4GN cukup berhasil. Humas BNNP membangun hubungan baik dengan masyarakat dengan memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi BNNP Kaltim dengan mempublikasikan ke media setiap kegiatan P4GN di masyarakat. Humas sebagai fasilitator komunikasi menggunakan Call Center untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Humas sebagai fasilitator pemecah masalah menjalankan koordinasi menggunakan whatsapp. Pada tahap teknisi komunikasi Humas menjaga hubungan baik dengan media massa. Humas membuat press release yang di salurkan melalui media massa dan media sosial.

Kata Kunci : *Peran Humas, Program P4GN, BNNP Kaltim*

Pendahuluan

BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim juga memiliki fungsi menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba menggunakan sosialisasi dan memberikan informasi tentang obat-obatan terlarang terbaru, serta kegiatan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim kepada masyarakat. Adanya tugas dan fungsi tersebut BNNP Kaltim memerlukan peran humas dimana, humas memiliki peran penting di setiap instansi untuk berkomunikasi dengan publik.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: enviariska@yahoo.com

² Pembimbing I dan Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Pembimbing II dan Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan pemahaman pada masyarakat dalam menanggulangi narkoba di BNNP Kaltim pada publik. Humas memiliki kegiatan yaitu kegiatan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) yang ditujukan untuk publiknya. Humas sebagai fasilitator komunikasi harus menjadi sebuah jembatan bagi publik instansi untuk mendengar apa yang di dengar dan diharapkan oleh publiknya dan harus mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan organisasi kepada publiknya.

Peran humas di BNNP Kaltim sangat penting dalam menjalankan program P4GN di Kalimantan Timur. Karena, Berhasil atau tidaknya dalam melaksanakan kegiatan P4GN untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang baik. Serta, memberikan pemahaman masyarakat untuk mau ikut serta melaksanakan program P4GN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kaltim akan ditentukan dengan bagaimana peran humas di BNNP Kaltim.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimana Peran Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menjalankan Program P4GN?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pernyataan singkat mengenai keinginan yang akan dicapai dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Bagaimana Peran Humas Badan Narkotika Naional Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menjalankan Program P4GN.

Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep, teori ilmu pengetahuan khususnya bidang peran humas.
- b. Secara Praktis
Harapannya dapat berguna bagi penentu kebijakan dalam program menanggulangi narkoba di Kaltim dalam pembangunan yang senantiasa memperhatikan kebutuhan baik itu kebutuhan yang dirasakan dan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Teori SMCR

Teori S-M-C-R-E terkandung formulasi yang sama seperti yang dinyatakan oleh Evertt M. Roger dan W. Floyd Shomaker, dalam bukunya berjudul

Communication Of Innovation. New York : Free Press (1971), yaitu : “*A common model of communication is the source, message, channel, receiver, and effect*” yang dikenal dengan model proses komunikasi dengan formula S - M - C - R - E (Ruslan 2006:101).

Model komunikasi S - M - C - R - E diatas dapat dijabarkan sebagai berikut: *Source*, yaitu individu atau pejabat humas yang berinisiatif sebagai sumber atau untuk menyampaikan pesan - pesannya. *Message*, adalah suatu gagasan, ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan atau ungkapan yang akan disampaikan komunikator kepada komunikan. *Channel*, berupa media, sarana, atau saluran yang dipergunakan oleh komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan - pesan kepada khalayaknya. *Receiver*, merupakan pihak yang menerima pesan dari komunikator. *Receiver* seringkali disebut sebagai komunikan. *Effect*, suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan -pesan tersebut, yang dapat berakibat positif maupun negative menyangkut tanggapan, persepsi, dan opini dari hasil komunikasi tersebut.

Humas

William L. rivers dan kawan-kawan (dikutip dari makalah Toto Tasmara dalam *Seminar Managerial Skill Work*, Labmend, Jakarta, 1990) mendefinisikan *public relation* (Kusumastuti,2004:15), sebagai berikut :

"*public relation is the skilled of communications of ideas to the various publics with the object of producing a desired result... to change the public image of an individual or corporation or to other public attitude toward company policies*" yang artinya “Hubungan masyarakat adalah ketrampilan komunikasi gagasan ke berbagai publik dengan tujuan menghasilkan hasil yang diinginkan untuk mengubah citra publik seseorang atau korporasi atau sikap masyarakat lainnya terhadap kebijakan perusahaan”.

Didalam humas juga terdapat karakteristik hubungan masyarakat. Menurut Kusumastuti (2004:15) terdapat 4 ciri utama humas, antara lain :

- a. Adanya upaya Komunikasi yang bersifat dua arah
- b. Sifatnya yang terencana
- c. Berorientasi pada Organisasi/Lembaga
- d. Sasarannya adalah publik

Peran Humas

Mewujudkan visi dan misi perusahaan untuk menjadi besar dan maju bukanlah pekerjaan mudah, hambatan dari lingkungan internal maupun eksternal merupakan hal-hal yang tidak dapat diduga.

- a. Menurut Cutlip, dkk (2011:46), peran humas terbagi atas 4 (empat) yaitu:
- b. Penasehat Ahli (*Expert Prescriber*)
- c. Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*)
- d. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Fasilitator*)
- e. Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*)

Tujuan Humas

Humas pada hakikatnya adalah aktivitas, maka sebenarnya tujuan humas dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi. yakni adanya penguatan dan perubahan kognisi, afeksi dan perilaku komunikannya.

Menurut Kusumastuti (2004:20) ada 3 tujuan humas, yaitu :

- a. Terpelihara dan terbentuknya saling pengertian (Aspek Kognisi)
- b. Menjaga dan membentuk saling percaya (Aspek Afeksi)
- c. Memelihara dan menciptakan kerja sama (Aspek Psikomotoris)

Fungsi Humas

Menurut Djanaid (1993) dalam kusumastuti (2004:22) disebutkan 2 fungsi PR, yakni :

1. Fungsi Konstruktif
2. Fungsi Korektif

Humas Pemerintah

Menurut Hairunnisa (2015:46) Humas dalam pemerintahan digunakan untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. tentunya kebijakan yang dipublikasikan adalah kebijakan yang berpengaruh terhadap masyarakat.

Komunikasi

Adapun definisi lain, Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. (Effendy, 2008:5).

Definisi Konsepsional

Humas adalah suatu perwakilan dari instansi yang bertugas menjaga dan bertanggung jawab atas citra dari Instansi. Humas berfungsi untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah agar sampai kepada publik. Dengan adanya peran humas di instansi pemerintahan, kebijakan pemerintah serta tanggapan dari masyarakat dapat saling memahami dengan tidak adanya kesalah pahaman antara instansi dengan publiknya.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan tipe deskripsi kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam terkait pencarian fakta dengan interpretasi tepat atau menggambarkan obyek sebagaimana mestinya. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menggambarkan “Peran Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menjalankan Program P4GN”.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berguna untuk membatasi studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan memudahkan peneliti dalam pengolahan data yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Menurut Cutlip, dkk (2009:46), peran humas terbagi atas 4 (empat) yaitu:

- a. Penasehat Ahli (*Expert Prescriber*)
- b. Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*)
- c. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*)
- d. Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*)

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Waktu penelitian telah dilaksanakan kurang lebih 1 bulan lamanya.

Sumber Data

1. Data Primer

Pemilihan sumber informasi didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia untuk memberikan data yang diperlukan peneliti. Atau data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan Tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan oleh peneliti untuk informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber informasi antara lain:

- a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan pemerintah Kota Samarinda
- b. Buku-buku Referensi

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Kualitatif (Kriyantono,2006:194) yang dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil di kumpulkan peneliti di lapangan. Data tersebut baik dari observasi, wawancara, maupun dari dokumen-dokumen. Analisis data dalam penelitian ini juga mengacu pada model analisis interaktif yang di kembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Sejarah Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan sejak tahun 2013. Tugas dari BNNP KALTIM yaitu memberantas masalah narkoba di Kalimantan Timur yang semakin rawan, tentunya dengan menjalankan program P4GN yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk BNN di seluruh Indonesia. P4GN adalah singkatan dari Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yaitu upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba untuk itu diperlukan kepedulian dari instansi pemerintah dalam upaya tersebut dengan mendorong satgas di instansi pemerintah menjadi pelaku P4GN secara mandiri.

Visi & Misi

a. Visi

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh koponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

b. Misi

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

Surat Keputusan Humas BNNP KALTIM

Kegiatan tugas jabatan:

1. Menyusun program kerja dan rencana evaluasi kehumasan
2. Monitoring hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kehumasan
3. Mengedit berita dan foto tahap akhir untuk diberitakan dimedia cetak dan laporan ke humas BNN RI
4. Membuat menyiapkan siaran pers atau pers rilis kegiatan BNNP KALTIM
5. Melaksanakan agenda setting pemberitaan di media massa
6. Mengkoordinasikan peliputan oleh jajaran ke humasan BNNP KALTIM
7. Melaksanakan koordinasi dan menghadiri undangan ke instansi terkait dan kegiatan lainnya.

Struktur Organisasi

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur adalah instansi perwakilan Badan Narkotika Nasional. Yaitu lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah, dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menjalankan Program P4GN

Penasehat Ahli

Pada peran humas sebagai penasehat ahli BNNP Kaltim dalam menjalankan kegiatan P4GN berhasil. Keberhasilan BNNP Kaltim dalam mengajak masyarakat untuk melaksanakan P4GN dapat dilihat dari, masyarakat yang dewasa ini lebih aktif dan lebih mandiri menghubungi atau mengundang BNNP Kaltim untuk terlibat ke setiap acara ataupun kegiatan yang ada di ruang lingkup masyarakat. Arti dari mandiri disini ialah dimana masyarakat tanpa di himbau oleh BNNP Kaltim untuk mengadakan kegiatan di masyarakat namun sekarang mereka lah yang membuat kegiatan itu sendiri dan ingin melibatkan instansi.

Fasilitator Komunikasi (Communication Facilitator)

Humas di BNNP Kaltim pun sebagai seorang komunikator juga dituntut untuk mampu meminimalisir kendala dalam penyelesaian masalah yang menyangkut perusahaan. Dalam hal ini humas telah melakukan upaya komunikasi dan koordinasi menjadi perantara antara pegawai yang ingin mengajukan kegiatan P4GN secara tiba – tiba dan sebagai seorang humas membantu membuatkan berita acara agar dapat disetujui oleh pimpinan dengan cepat. Dan juga sebagai fasilitator komunikasi humas BNNP Kaltim menjadi juru bicara instansi untuk turun langsung menghadapi masyarakat atas laporan tentunya atas perintah pimpinan. Humas juga sebagai penjembaran BNNP Kaltim dalam menedengarkan laporan dan informasi yang diberikan oleh masyarakat melalui call center yang telah tersedia di BNNP Kaltim.

Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Fasilitator)

Dalam merancang program –program kegiatan P4GN dan mengaplikasikannya ke masyarakat untuk menyampaikan pesan , maksud, dan tujuan manajemen dalam rangka mengajak masyarakat serta mendapatkan kepehaman masyarakat terhadap BNNP Kaltim . dalam hal ini, diperlukan juga evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh manajemen namun yang terjadi di BNNP Kaltim evaluasi tersebut melewati tahap tersebut dikarenakan humas BNNP Kaltim tidak ikut secara langsung dalam kegiatan dan juga tidak di konsultasikan kepada pihak yang memberikan laporan sehingga ada sedikit perbedaan dalam kronologis laporan dan yang akan disampaikan oleh media.

Selain itupun masalah internal akan sedikit tidak terkondisi karena adanya kesalahpahaman antara humas dan pegawai pada saat humas merancang program dan mengaplikasikannya ke masyarakat untuk menyampaikan tujuan BNNP Kaltim dan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan BNNP Kaltim untuk masyarakat karena itu sangat dibutuhkan pada saat sebelum pengaplikasian karena evaluasi tersebut tidak dapat dilakukan serta merta tanpa dasar kronologi kegiatan secara mendetail.

Teknisi Komunikasi (Communication Technician)

Humas juga membangun hubungan baik dengan para awak media agar mempermudah bagi BNNP Kaltim untuk menyampaikan atau membantah berita yang dimuat media massa dan sebaliknya pers membutuhkan informasi resmi akurat dan berimbang yang di dapatkan oleh humas BNNP Kaltim tentunya hal ini bersangkut paut dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjalankan kegiatan P4GN seperti membuat *release* terkait dengan kegiatan dan pencapaian instansi melalui media. hal ini dilakukan guna menyebarluaskan pesan BNNP Kaltim tentang P4GN sejalan dengan UU RI No.35 tahun 2009 dan diharapkan masyarakat tidak salah paham dan tidak krisis kepercayaan terhadap BNNP Kaltim untuk mau ikut serta dalam melaksanakan P4GN dilingkungan sekitar masyarakat itu sendiri.

Analisis Teori S-M-C-R-E dalam Peran Humas BNNP Kaltim dalam menjalankan program P4GN

Penasihat Ahli (Expert Prescriber)

Dalam Teori S-M-C-R-E terdapat *channel* (saluran). Saluran pada kegiatan sosialisasi menggunakan *Focus Group Discussion* atau Grup Diskusi. *Receiver* (penerima) pada sosialisasi secara umum adalah masyarakat, yang terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, Mahasiswa, Pegawai Negeri, dan Pegawai Swasta. Pada Tahap Akhir Teori SMCRE terdapat *Effect* (efek) yang merupakan *feedback* atau hasil dari informasi yang telah disampaikan. Efek pada sosialisasi ini Masyarakat akan paham bahaya penyalahgunaan Narkoba. Sehingga masyarakat mengundang

BNNP KALTIM untuk ikut serta sebagai tamu atau narasumber dalam kegiatan yang diakan masyarakat.

Fasilitator Komunikasi (Communication Facilitator)

Pada fokus fasilitator komunikasi ini adalah Masyarakat (seseorang yang menyampaikan informasi melalui *call center*. Pada tahap *message* (pesan) yang disampaikan melalui *call center* adalah informasi mengenai penyalahgunaan narkoba disekitar lingkungan masyarakat, konsultasi kerabat atau keluarga yang telah menggunakan narkoba dan ingin merehabilitasi. *Channel* pada *call center* tentu saja saluran telekomunikasi, Whatsapp atau Telpon yang telah disediakan sebagai *Call Center*.

Receiver (Penerima) dari *Call center* ini adalah Humas BNNP Kaltim. Informasi yang diterima melalui *call center* akan diarahkan pada bidang yang sesuai dengan kebutuhan informasi dari masyarakatnya. *Effect* dari *Call Center* adalah Humas BNNP dapat sekaligus menyampaikan pesan atau kebijakan BNNP Kaltim terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang menghubungi *call center*.

Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Fasilitator)

Pada fokus Proses Pemecahan Masalah bentuk kegiatannya adalah koordinasi antara pegawai BNNP Kaltim dan Humasnya. sebagai *Source* sumbernya adalah Pegawai BNNP Kaltim. Mulai dari bidang P2M, bidang Rehabilitasi, dan bidang penyelidikan. Untuk *message* (Pesan) dalam fokus ini adalah bagaimana hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh setiap bidang di bentuk menjadi laporan untuk di evaluasi. *Channel* pada kegiatan yang dilakukan fokus kepada Whatsapp. Informasi yang telah dibuat sebagai laporan tersebut dikirimkan melalui whatsapp. *Receiver* (Penerima) tentu saja pihak Humas BNNP Kaltim yang mengevaluasi hasil kegiatan atau laporan yang telah diberikan oleh pegawai BNNP Kaltim. *Effect* dari bentuk kegiatan ini menciptakan koordinasi atau kerjasama antara Pegawai BNNP Kaltim dan Pihak Humas BNNP Kaltim

Teknisi Komunikasi (Communication Technician)

Pada fokus teknisi komunikasi merupakan membangun hubungan baik dengan media massa, menciptakan sarana diskusi terbuka untuk masyarakat, dan memberikan informasi yang tepat dan akurat untuk masyarakat. *Channel* atau saluran melalui media pers, press release, dan Facebook. Penerima informasi (*receiver*) secara garis besar adalah Masyarakat kaltim dan pengguna media social. *Effect* yang terjadi membuat masyarakat mengetahui bentuk – bentuk kegiatan BNNP Kaltim di masyarakat. Sehingga nantinya menciptakan kepercayaan kepada BNNP Kaltim oleh masyarakat. Tujuannya menjadikan pola pikir masyarakat sebagai penolong masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Bukan menyakiti masyarakat seperti memenjarakan diubah menjadi rehabilitasi untuk mengobati masyarakat yang kecanduan narkoba.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan Teknik Komunikasi pada program Relokasi di Kelurahan Gunung Kelua adalah: Berdasarkan pada penyajian data dan pembahasan mengenai Peran Humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menjalankan Program P4GN, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Peran humas sebagai penasehat ahli BNNP Kaltim salah satunya dalam setiap kegiatan P4GN, Humas selalu ikut serta menyampaikan informasi dalam kegiatan sosialisasi Program P4GN. Humas melakukan hal tersebut fungsinya untuk memberikan pemahaman dan sudut pandang positif masyarakat kepada BNNP Kaltim. Dalam fungsinya sebagai penasihat ahli selain melakukan sosialisasi, Humas juga yang merencanakan dan mengevaluasi setiap kegiatan dari BNNP Kaltim. Humas telah menjalankan fungsi sebagai penasihat ahli dengan baik. Hal tersebut di tunjukkan dengan masyarakat yang lebih aktif dan memberikan respon yang baik ketika dilaksanakan sosialisasi oleh BNNP Kaltim.
2. Humas BNNP Kaltim sebagai fasilitator komunikasi merupakan media komunikasi antara masyarakat dengan instansi. Humas BNNP Kaltim menjadi perantara Humas BNNP dalam menyampaikan kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan – kebijakan yang telah dibuat BNNP Kaltim tersebut dibuat berdasarkan masukan dari masyarakat sendiri. sehingga, tidak ada penolakan dari masyarakat atas kebijakan yang telah dibuat. Salah satu media untuk masyarakat berkomunikasi dengan Humas BNNP Kaltim secara langsung menggunakan call Center. Fungsinya agar informasi yang disampaikan masyarakat lebih tepat dan *feedback* kepada masyarakat lebih cepat.
3. Peran Humas BNNP Kaltim sebagai Proses pemecahan masalah kurang maksimal. Karena Humas BNNP Kaltim dalam melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi tidak terlibat secara penuh. Humas BNNP hanya merencanakan kegiatan tersebut tanpa hadir sewaktu kegiatan proses berlangsung. Hasil dari kegiatan tersebut akan dievaluasi oleh humas yang diterima humas melalui *whatsapp* saja dan segera dibuat laporan untuk diberikan kepada pimpinan namun tidak di diskusikan kembali oleh pegawai yang memberikan laporan atau yang mengetahui secara kronologis kegiatan saat berlangsung. Sehingga, pada saat ada kendala pada aktivitas kegiatan Program P4GN, Humas tidak memberikan solusi yang tepat dan hasil laporan yang telah diberikan oleh pimpinan tidak maksimal.
4. Peran Humas BNNP sebagai Teknikisi Komunikasi dijalankan menggunakan beberapa cara. Humas BNNP Kaltim yang pertama menjaga hubungan baik dengan semua Media Massa. Fungsinya ketika Humas sedang menghadapi masalah yang ingin diselesaikan seperti adanya kesalahpahaman antara BNNP Kaltim dengan publiknys, media massa dapat menjadi penghubung instansi pada publiknya untuk mengatasi kesalahpahaman diantaranya. Seperti

menyampaikan isi pesan tentang kegiatan yang megdukasi masyarakat ataupun mempublis ke media kegiatan – kegiatan P4GN yang dilakukan BNNP Kaltim untuk masyarakat di Kaltim. Sehingga masyarakat dapat merasakan adanya keberadaan BNNP Kaltim didalam ruang lingkup masyarakat melalui kegiatan yang di adakan humas seperti *Press release*, mengadakan Jumpa Pers dengan media massa, dan membuka ruang obrolan untuk masyarakat melalui media sosial *facebook*.

Saran

Dalam skripsi ini, peneliti menyampaikan beberapa saran – saran berguna dan dapat dijadikan pertimbangan agar dapat menjadi solusi bagi BNNP Kaltim.

1. Berdasarkan Hasil penelitian peran Humas BNNP Kaltim sebagai penasihat ahli dari BNNP Kaltim sudah berjalan sebagaimana konsep yang ada. Saran dari penulis Humas BNNP Kaltim ada baiknya lebih cepat tanggap dalam menangani masalah antara BNNP Kaltim dan Masyarakat. Humas BNNP Kaltim sebaiknya juga turut aktif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Agar ketika nanti timbul konflik antara Masyarakat dengan BNNP Kaltim dalam memberikan solusi kepada masyarakat tidak menyulitkan Humas BNNP Kaltim.
2. Humas BNNP Kaltim sebagai Fasilitator Komunikasi ada baiknya lebih aktif untuk terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh bidang lainnya pada saat turun ke lapangan. Karena Humas BNNP Kaltim secara tidak langsung sebagai tangan kanan dari Kepala BNNP Kaltim. Jika dilapangan ada masalah atau kendala, Humas dapat bertindak lebih cepat untuk mengantisipasi masalah menjadi krisis yang lebih besar.
3. Ada Baiknya Humas BNNP Kaltim sebagai Proses Pemecah masalah selain menggunakan komunikasi via Whatsapp juga menggunakan komunikasi langsung dan membuat saluran telpon langsung antara pegawai dengan Humas BNNP Kaltim atau Kepala BNNP Kaltim. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pegawai dan Humas BNNP Kaltim.
4. Humas sebagai Teknisi Komunikasi Komunikasi dari BNNP Kaltim kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Humas sudah menggunakan media massa atau melalui media online untuk menginformasikan bahaya dari penggunaan narkoba dan kebijakan lainnya. Humas BNNP Kaltim menerima aspirasi masyarakat melalui call center, Facebook, dan *feedback* langsung dari masyarakat ketika BNNP Kaltim melakukan Sosialisasi efek penyalahgunaan Narkoba kepada Masyarakat. Saran dari penulis ada baiknya juga humas menyiapkan Kotak Kritik dan Saran pada saat aktivitas Sosialisasi dan diletakkan juga di Kantor BNNP Kaltim. Karena tidak semua masyarakat berani dan mau menyampaikan saran atau kritik mereka secara langsung.
5. Saran lainnya yang dapat diterapkan untuk humas BNNP Kaltim adalah lebih baik humas yang ditugaskan merupakan lulusan pendidikan S1 dibidang

kehumasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ada baiknya humas memiliki tim sendiri agar lebih efektif dan maksimal. Tujuannya untuk mencapai visi & misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan program P4GN.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Amin Widjaja Tunggal. 2008. Dasar – Dasar Customer Relationship Management (CRM). Jakarta : Harvindo. Anggoro, M.Linggar. 2008. *Teori dan profesi kehumasan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Butterick, Keith.2014. *Pengantar Public Relations Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cutlip, Skott M., Center Allen H., Broom Glen M. 2011. *Effective Public Relations*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darmastuti, Rini.2012. *Media Relations Konsep, Strategi & Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Efendy, Onong Uchjana. 2013. *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hairunissa. 2015. *Public Relations: Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moore, Frazier. 2005. *Humas : Membangun citra dengan Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurudin. 2013 . *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ruslan, Rosady. 2006. *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemirat, Ardianto, Soleh, Elvinaro. 2010. *Dasar – dasar Public Relations*. Bandung: Rosdakarya
- Wiryanto. 2000. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Grasindo.

Jurnal:

- Rudianto.2010.“Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika”. Tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. (<http://eprints.ums.ac.id/9972/1/C100060119.pdf>, diakses pada tanggal 1 November 2017).
- Fadiyah, Annisa. 2017.”Peran Corporate Communication Department PT. Badak Natural Gas Liquefaction (NGL) Dalam Membentuk Citra Perusahaan Melalui Visi Menjadi Perusahaan Energi Kelas Dunia Yang Terdepan Dalam Inovasi Di Kota Bontang”. Diterbitkan di ejournal Ilmu Komunikasi Mulawarman, 55-56. Samarinda.

Sumber internet :

<http://uapminovasi.com/menilik-sejarah-kelam-pers/>, diakses 27 september 2017

<https://kaltim.antaraneews.com/berita/37008/63873-warga-kaltim-terlibat-penyalahgunaan-narkoba>, diakses 25 oktober 2017

Dokumen:

Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.